

SKRIPSI

**PENGARUH PAD, BELANJA SEKTOR KEAGAMAAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN
TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

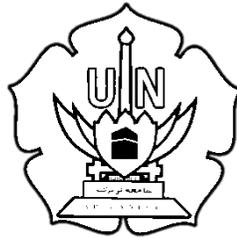
REDHAYATUL SYAFFITRI

NIM: 140602112

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

SKRIPSI

**PENGARUH PAD, BELANJA SEKTOR KEAGAMAAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN
TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

REDHAYATUL SYAFFITRI

NIM: 140602112

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Redhayatul Syaffitri
NIM : 140602112
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ranirry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 September 2018



Yang Menyatakan

Redhayatul Syaffitri

Redhayatul Syaffitri

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran
di Kota Banda Aceh**

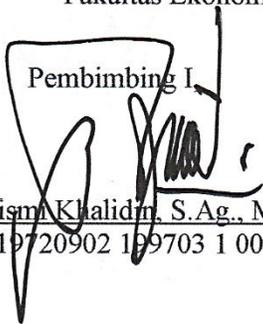
Disusun Oleh:

Redhayatul Syaffitri

NIM: 140602112

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Bism Khalid M. S. Ag., M.Si
NIP: 19720902 199703 1 001

Pembimbing II,



Hafizh Maulana, SP., S.H.L., ME
NIDN: 2006019002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Redhayatul Syaffitri

NIM: 140602112

Dengan Judul:

**Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran
di Kota Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018
15 Muharram 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Bismi Khalidun, S.Ag., M.Si

NIP: 19720902199703 1 001

Sekretaris,

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME

NIDN: 2006019002

Penguji I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

NIP: 19720428200501 1 003

Penguji II,

Khairul Amri, SE., M.Si

NIDN: 0106077507

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP: 19640314 199203 1 003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Redhayatul Syaffitri
NIM : 140602112
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : redhayatul.s@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 09 Oktober 2018

Penulis

Redhayatul

Pembimbing I

Dr. Bisni Khalid, S.Ag., M.Si
NIP: 19720902 199703 1 001

Pembimbing II

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN: 2006019002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si. Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, nasehat serta pengarahan baik

berupa saran maupun arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Khairul Amri, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang.
6. Muhammad Arifin, Ph.D dan Hafidhah, SE., M.Si.Ak., CA selaku Ketua Laboratorium dan Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan selama mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta ayahanda Ir. Syafruddin dan Ibunda Hayatul Wardani, SP atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan dan nasehat yang tiada hentinya agak penulis memperoleh yang terbaik. Adikku tersayang M. Alif Al-Hafiz serta seluruh keluarga tercinta yang telah mendoakan dan memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna memperoleh sarjana dan ilmu yang diperoleh berkah dan bermanfaat.

9. Sahabat terbaik Septiyani, Wawa, Nelfi, Riska, Zahara, Atsil, Munji, Arfianda, Wildan, Hasbi dan geng ngops yang selalu mendukung serta memberikan semangat untuk penulis dalam melakukan penelitian ini.
10. Sahabat seperjuangan Maryati, Evi, Rizka, Yuniar, Era, Ani, Nabila, Facrul yang telah memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan dalam penelitian ini serta menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang. Serta teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan, arahan, nasehat serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 01 September 2018

Penulis

Redhayatul Syaffitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama : Redhayatul Syaffitri
NIM : 140602112
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 25 September 2018
Tebal Skripsi : 101 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME

Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data time series. Sumber data diperoleh dari BPS Kota Banda Aceh dan BPKK dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian memperoleh koefisien PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai F-statistiknya adalah sebesar 0,007202 yang berarti secara bersama-sama atau simultan variabel PAD, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Kata Kunci: PAD, Belanja Sektor Keagamaan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Keuangan Daerah.....	14
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah	14
2.1.2 Faktor Keuangan Daerah	16
2.2 Konsep Keuangan Publik dalam Islam	18
2.2.1 Sumber-Sumber Keuangan dalam Islam	19
2.2.2 Belanja Sektor Keagamaan.....	26
2.3 Pertumbuhan Ekonomi	27
2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	27
2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	29

2.3.3	Pertumbuhan Ekonomidalam Perspektif Islam	31
2.3.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	37
2.4	Pengangguran	40
2.4.1	Pengertian Pengangguran	40
2.4.2	Pengangguran dalam Perspektif Islam	43
2.4.3	Jenis Pengangguran	46
2.4.4	Dampak dan Pengaruh Pengangguran	49
2.5	Keterkaitan Variabel	50
2.5.1	Keterkaitan PAD dengan Tingkat Pengangguran	50
2.5.2	Keterkaitan Belanja Sektor Keagamaan dengan Tingkat Pengangguran	51
2.5.3	Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran	52
2.6	Penelitian Terkait	53
2.7	Kerangka Pemikiran	59
2.8	Hipotesis Penelitian	59
BAB III METODE PENELITIAN		61
3.1	Jenis Penelitian	61
3.2	Jenis dan Sumber Data	61
3.3	Teknik Pengumpulan Data	62
3.4	Variabel Penelitian	62
3.4.1	Variabel Dependen	62
3.4.2	Variabel Independen	63
3.5	Metode Analisis Data	64
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	65
3.5.2	Analisis Regresi Linear Berganda	67
3.6	Pengujian Hipotesis	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		70
4.1	Analisis Deskriptif	70
4.1.1	Pengangguran	70
4.1.2	Pendapatan Asli Daerah	72
4.1.3	Belanja Sektor Keagamaan	74
4.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	76

4.2	Analisis Data	79
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	79
4.2.2	Uji Kriteria Statistik	82
4.2.3	Analisis Uji Regresi Linear Berganda	84
4.3	Pembahasan	85
4.3.1	Pengaruh PAD Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh	85
4.3.2	Pengaruh Belanja Sektor Keagamaan Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh	86
4.3.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh.....	87
BAB V PENUTUP		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Belanja Sektor Keagamaan Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017	6
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Tahun 2011-2015	8
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	56
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	64
Tabel 4.1 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2017	71
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas	80
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Usia	42
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	59
Gambar 4.1 Target dan Realisasi PAD Kota Banda Tahun 2007-2017	73
Gambar 4.2 Belanja Sektor Keagamaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2017	75
Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2017	78
Gambar 4.4 Uji Normalitas	79
Gambar 4.5 Uji Autokorelasi.....	81
Gambar 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Time Series.....	95
Lampiran 2 Regresi Linear Berganda.....	97
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas	98
Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas	99
Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	100
Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu daerah untuk lebih maju dapat dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad, 2004).

Terjadinya pembangunan di suatu daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di atur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta manfaat untuk masyarakat. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2001).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah (Mudawal & Siregar, 2013: 89).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) disahkan jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, percepatan pengesahan tersebut tidak berdampak signifikan dalam realisasi penyerapannya. Realisasi penyerapan APBA masih jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Aceh dari tahun 2006 sampai 2012 terjadi peningkatan, namun mengalami penurunan pada realisasi pendapatan tahun 2007.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017 melebihi dari target yang telah ditetapkan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh sebelumnya memasang target realisasi keuangan sebesar 93% dan fisik 100%, dan hingga 31 Desember 2017 target untuk keuangan tercapai 93,1% dan 99,5% untuk fisik.

Untuk realisasi keuangan telah melebihi dari target semula yaitu 93%, sementara realisasinya 93,1%.

Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah yang mencakup belanja pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Belanja daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, dan belanja lain-lain. APBD Aceh dirancang dan disusun dengan kinerja yang memuat sasaran yang diharapkan dalam pertumbuhan ekonomi di Aceh, kemudian kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan peruliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktifitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktifitas perekonomian.

Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proposi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin atau keserasian belanjannya rendah (Abimanyu, 2005). Halim (2001) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Apabila proposi belanja modal lebih besar dari belanja rutin, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan efektif sehingga fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat meningkat dan pada

akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang terjadi dalam masyarakat.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan bahwa dengan APBD 2018 ini pihaknya akan fokus merealisasikan visi-misi mereka yang telah dijanjikan kepada masyarakat seperti memberi bantuan terhadap orang meninggal, sektor agama, memperkuat ekonomi rakyat, memberi beras miskin dan lainnya. Belanja sektor keagamaan sangat didukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh seperti mengadakan MTQ yang mulai dari kota, kabupaten sampai tingkat provinsi.

Belanja sektor keagamaan itu termasuk ke dalam dana alokasi umum di mana tertera dalam BAB V pasal 16 UU 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu: Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;

- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 11 Tahun 2006).

Belanja daerah diklarifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Klarifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klarifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari urusan pemerintah dan fungsi pengelolaan keuangan negara yang salah satunya itu terdapat sektor keagamaan.

Tabel 1.1
Belanja Sektor Keagamaan Kota Banda Aceh
Tahun 2015-2017

Tahun	Total Belanja	Belanja Syariah	Rasio (%)
2015	640.306.470.456	34.739.671.068	5,425
2016	667.454.076.398	36.516.567.339	5,471
2017	701.804.067.489	43.181.562.570	6,152

Sumber: BPKK, data diolah penulis (2018)

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa belanja syariah kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 belanja syariah kota Banda Aceh mencapai 5,425%, dan di tahun 2016 belanja syariah kota Banda Aceh mengalami peningkatan kembali yaitu 5,471%, kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi yaitu 6,152%.

Alamsyah (2013: 44) Belanja daerah masih menjadi modal penting yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di Aceh, terutama bagi kota Banda Aceh dalam menjalankan pemerintahannya, karena kota Banda Aceh belum memiliki pendapatan lain yang besar dan hanya mengharapkan pada belanja daerah. Oleh karena itu, semua daerah di Aceh sangat tergantung pada belanja daerah khususnya adalah belanja modal yang menjadi bagian dari aset daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dalam membangun daerah masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan keadaan di mana kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar baik itu kebutuhan makan maupun non makan. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran
Tahun 2011-2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran
2011	4,54	8.523
2012	5,33	7.174
2013	4,67	8.706
2014	4,50	10.239
2015	5,01	12.003

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2018)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan. Tetapi di tahun 2013 sampai dengan 2014 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan kembali.

Kemudian tingkat pengangguran di kota Banda Aceh tahun 2011-2015 setiap tahunnya terus mengalami fluktuatif. Jumlah pengangguran di kota Banda Aceh tahun 2011 mencapai 8,523 tetapi pada tahun 2012 jumlah pengangguran kota Banda Aceh mengalami penurunan yaitu 7,174. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 jumlah pengangguran kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan kembali.

Pengangguran merupakan masalah yang harus segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Pemerintah harus berupaya mengatasi pengangguran dengan mengeluarkan kebijakan seperti menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di kota Banda Aceh.

Tingkat pengangguran di kota Banda Aceh masih tinggi, tetapi semakin membaik dengan adanya penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Timbulnya pengangguran juga dikarenakan oleh rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya tenaga kerja yang di PHK akibat para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri gulung tikar dan melarikan modalnya ke luar negeri.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pemerintah kota Banda Aceh dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran. Pemerintah juga diuntut untuk mengambil inisiatif kebijakan fiskal yang tepat untuk menumbuhkan perekonomian dalam rangka mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan stabil akan mendorong berkurangnya jumlah pengangguran.

Pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula,

sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Mengingat kondisi keuangan daerah yang perlu ditingkatkan potensinya, maka pendapatan asli daerah terus menerus digali dan dikembangkan dalam rangka memperbesar penerimaan daerah harus terus diupayakan peningkatannya.

Belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila perekonomian meningkat maka daya serap angkatan kerja juga akan meningkat sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang dan kemungkinan besar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di suatu Banda Aceh. Namun yang terjadi sekarang adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat tetapi tidak di dukung oleh pertumbuhan lapangan kerja sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran semakin serius.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.
3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk memperkuat teori yang berhubungan dengan pendapatan belanja negara, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dan dapat berguna untuk memberikan informasi bagi pihak akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca yang berguna agar lebih mengetahui tentang pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih mengetahui dan mengidentifikasi secara mendalam mengenai pengaruh pendapatan PAD, belanja sektor keagamaan, pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di kota Banda Aceh serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.

1.5 Sistematika Penelitian

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk menggambarkan sekilas isi dari skripsi ini yang mana disusun dalam lima bab pembahasan secara sistematis. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori yang terkait dengan penelitian ini yang dijelaskan dari yang

paling umum sampai khusus berdasarkan penelitian. Bab ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan secara sistematis sesuai dengan rumusan penelitian dan tujuan penelitian, serta menguraikan tentang objek penelitian, hasil dari analisis data dan penarikan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta beberapa saran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Tunggal, 2007).

Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau lalai. Kerugian daerah yang dimaksud adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian ini tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum (Tunggal, 2007).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah

ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Faktor Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Sebagai alat pengukur, penakar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerah lah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 2007: 87).

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi

mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Kaho, 2007: 93).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Yuwono, 2005: 67).

Berikut ini terdapat beberapa sumber pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah dipisahkan
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
 - 1) Sumbangan dari pemerintah
 - 2) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Zakat
- d. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.2 Konsep Keuangan Publik dalam Islam

Keuangan publik merupakan pungutan yang dibebankan pemerintah kepada orang tertentu untuk tujuan negara tertentu, misalnya untuk pertahanan negara, pungutan dilakukan secara purposif, untuk kepentingan darurat (perang) kemudian keuangan publik dikenakan atas orang kaya saja. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku

bangsa, dan status sosial. Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat (Huda dkk, 2012: 78).

2.2.1 Sumber-Sumber Keuangan dalam Islam

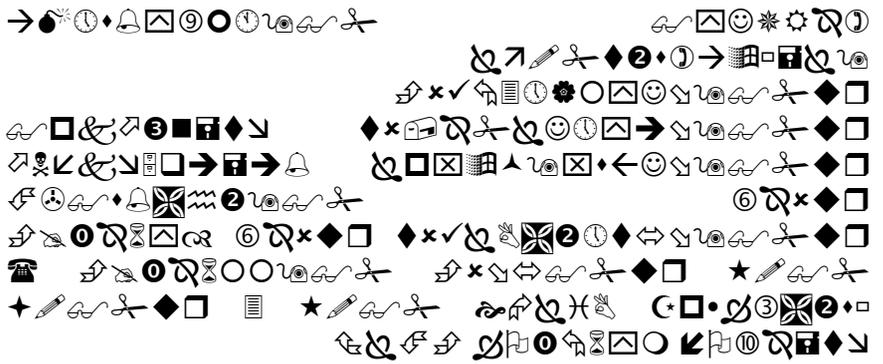
Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam, maka selama itu pula diperkenankan menurut islam kemudian setiap dalam bermuamalah itu boleh namun jika terjadi di luar ajaran agama Islam maka itu semua akan kembali lagi kepada hukum asal yaitu haram. Oleh karena itu, terdapat beberapa instrumen pembiayaan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat

Sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan negara Islam pada periode klasik serta di negara-negara Islam pada umumnya adalah zakat yang notabnya merupakan salah satu dari rukun Islam. Pengeluaran/ pembiayaan zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak sejarah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap Muslim yang telah dewasa,

merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa: emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen.

Kewajiban zakat secara tegas dinyatakan dalam Al-quran, yaitu:



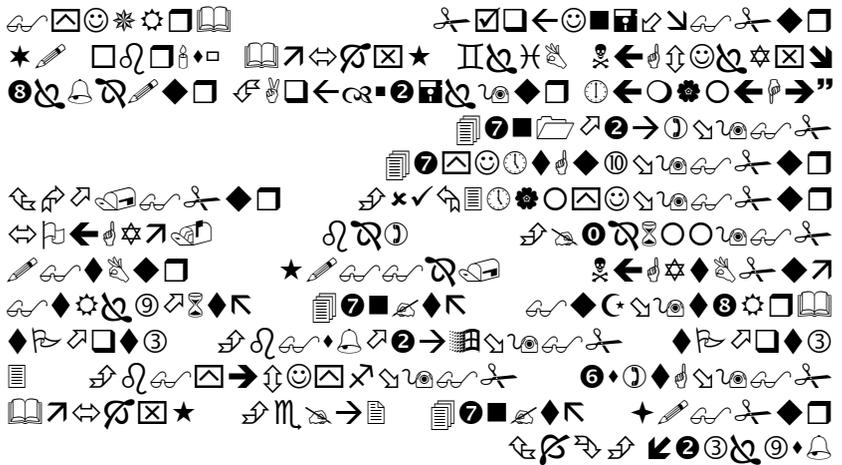
“Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan; merupakan sesuatu ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]: 60).

2. Aset dan Perusahaan Negara

Disamping negara mendapatkan penerimaan berupa zakat, yang bisa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fa'i. Kedua harta ini diperoleh dari masyarakat

non-muslim, baik melalui pemaksaan perang ataupun melalui jalan damai.

Meskipun demikian, harta ghanimah bukanlah merupakan tujuan utama peperangan. Sebagian besar harta ghanimah dipergunakan untuk kesejahteraan tentara dan sebagian kecil untuk umat Islam. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat perlima atau delapan puluh persen. Al-quran telah mengatur hal ini secara jelas dalam Q.S Al-Anfal ayat 41, yaitu:



“Katakanlah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan”. (Q.S Al-Anfal [8]:41)

3. Pajak Bumi atau Kharaj

Dalam Islam pajak dikenal dengan nama *adh-dharibah* atau *al-maks*, yaitu pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak juga dikenal sebagai tambahan bagi kaum Muslimin setelah zakat yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj dan berbeda sifat dan karakteristiknya dengan pajak menurut non-Islam. Pemberlakuan pajak dalam Islam harus adil dan selaras dengan semangat nilai-nilai Islam serta digunakan untuk kepentingan (masalah) yang lebih besar. Karena itu, sistem pajak yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqasid.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikulnya.
- c. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut (Aravik, 2017: 96).

Sistem anggaran belanja yang efektif tidak sekedar fokus pada pembiayaan tapi terselenggaranya dan tercapainya target-target yang direncanakan. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi publik bertujuan mengendalikan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Secara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam menentukan kebijakan ekonomi publik (Huda dkk, 2015: 94), ada enam prinsip umum untuk

membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:

- a. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat
- b. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tenteram
- c. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik
- e. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya
- f. Sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

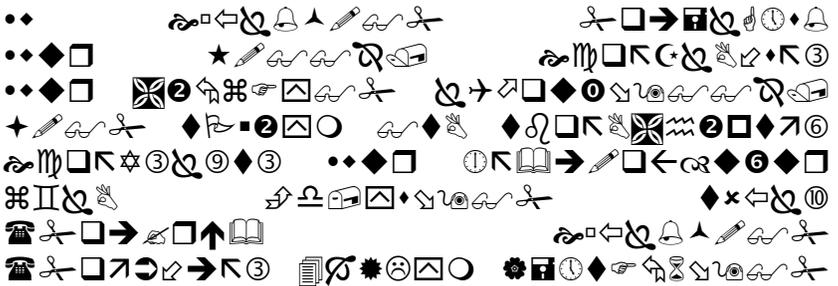
Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Dalam pelaksanaannya, *kharaj* dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperempat, seperlima, dan sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, *kharaj* proporsional adalah tidak tetap tergantung pada

hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali.

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah Saw.membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah islam, yang disebut *kharaj*.

4. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam kepada mereka guna melindungi kehidupannya. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim dan non-muslim dari rasa aman. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah, orang-orang Kristen dan Yahudi, dikecualikan dari kewajiban menjadi militer di negara Islam. Mereka memperoleh konsesi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya maka orang-orang non-muslim diwajibkan mengganti dengan pembayaran jizyah. Dijelaskan dalam firman-Nya:





“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) keada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama yang benar agama Allah, (yaitu orang-orang) yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (Q.S Al-Taubah [9]: 29)

Meskipun *jizyah* merupakan hak wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, yaitu bahwa *jizyah* dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, yang mampu membayarnya. Sedang bagi perempuan, anak-anak, orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran, pengemis, tidak dikenakan pajak. Jumlah *jizyah* yang harus dibayar, sangat bervariasi antara 12 dan 48 dirham setahun, sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika seseorang memeluk agama Islam, kewajiban membayar *jizyah* itu ikut gugur. Hasil pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

5. Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang

atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah di wakafkan keluar dari hak milik yang diwakafkan (wakif), dan bukan pula hak milik nadzir/lembaga pengelola wakaf, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh mawquf-alaih (pihak yang berhak menerima hasil wakaf). Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif (Mannan, 1997).

2.2.2 Belanja Sektor Keagamaan

Pendapatan Asli Daerah disalurkan untuk anggaran penerapan Syariat Islam di Aceh yang ditetapkan sebesar 5% pada anggaran pendapatan dan belanja (APBA) nilainya mencapai hampir 700 miliar rupiah. Dana Dinas syariat Islam terutama berfungsi sebagai lembaga dakwah dan penguatan akidah. Pengeluaran di sektor keagamaan (syariat Islam) jenis belanja yang di gunakan antara lain:

- a. Pegawai
- b. Barang dan jasa
- c. Modal

Kemudian banyak hal lainnya yang bersifat keagamaan yang dapat dilakukan dalam sektor syariat Islam diantaranya: beragam

acara bertema religi. Kegiatan-kegiatan tersebut bergenre interaktif, hobi, edukasi, hingga pengajian Islami, kemudian kegiatan Dialog Dakwah Ramadhan, untuk menguatkan edukasi dalam bidang keagamaan pemerintah juga mengadakan Program Madrasah Ramadhan. Selanjutnya program keagamaan yang dilakukan pemerintah yaitu MTQ tingkat Provinsi Aceh di Aceh Timur pemerintah mengalokasikan sebagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 20 Miliar Rupiah dan juga kegiatan sail Sabang dalam rangka peringatan tsunami Aceh (Serambi news, 2017).

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan khususnya yang ada di Kota Banda Aceh yaitu, MPU, MAA, Baitulmall, Dinas Syariat Islam dan lain-lain.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan atau total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Nanga, 2005: 77).

Pertumbuhan ekonomi memegang peran terpenting selaku indikator pembangunan suatu negara. Bahkan tidak jarang pertumbuhan ekonomi diidentikkan pula dengan kesejahteraan dan tingkat kehidupan. Beberapa tahun terakhir ini baru disadari bahwa hal ini tidak benar. Aspek komponen-komponennya, seperti konsumsi, tabungan, investasi, pengeluaran pemerintah, dan sebagainya masih tetap memegang peranan penting. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam skala regional, pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode pembangunan tertentu, baik secara riil maupun secara nominal. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau suatu daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya infrastruktur ekonomi (Kristiana, 2009).

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output,

maka proses ini akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil dan juga persentasi terhadap modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006).

2.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antarlain:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Persediaan barang-barang modal
- 3) Luas tanah dan kekayaan alam
- 4) Penerapan teknologi

Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada penambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap (Green, Marshall dkk, 2010: 47).

b. Teori Harrod-Domar

Tujuan dari teori Harrod-Domar yaitu untuk menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi bagi mencapai penggunaan barang-barang modal secara penuh dari masa ke masa. Teori ini menerangkan keadaan yang akan terjadi apabila keadaannya melebihi atau kurang dari syarat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan sepenuhnya dari barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat (Irawan & Suparmoko, 2002: 55).

c. Teori Petumbuhan Ekonomi Schumpeter

Peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan oleh Schumpeter dalam teorinya, pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Adapun bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh

pengusaha antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi dan mencari sumber bahan mentah. Untuk menjalankan inovasi yang telah ditemukan tentu membutuhkan modal. Pengusaha akan meminjam modal tersebut untuk keperluan investasi usahanya. Ada dua jenis investasi yang timbul, yaitu sebagai berikut:

- 1) Investasi otonom adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi.
- 2) Investasi terpengaruh adalah investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru.

2.3.3 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu penggunaan parameter falah. Falah

merupakan kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah sistem ekonomi yang dapat mengantar umat manusia kepada kesejahteraan yang sebenarnya (Huda, 2008).

Naf'an (2014: 145) menyatakan dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Suatu peningkatan dari faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan dampak buruk dan membahayakan manusia.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menurut Yusuf untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-taiyibah*). Dr Abdul Ghani 'Abod: Adams mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai: "*Perkembangan atau peralihan yang berterusan, merangkum pengagihan semula sumber-sumber kekayaan. Perkembangan dari sudut sejarahnya dari era pertanian kepada era industri dan dari tahapitu kepada era perkhidmatan.*"

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, diantaranya:

- a. Sumber daya yang dapat dikelola
- b. Sumber daya manusia
- c. Wirausaha

d. Teknologi

Dilihat dari segi material, penekanan pada kenaikan pendapatan per kapita dan pertumbuhan yang cepat serta terus-menerus pada waktu tertentu, tidak menjamin terciptanya kondisi islami untuk pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut tidak mampu mengatasi masalah luasnya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, yang justru merupakan masalah pokok dalam ekonomi Islam (Mannan, 1997).

Umar Chapra memaparkan pemikiran beliau tentang ekonomi Islam yaitu:

1. Kapitalisme

Suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya “kapital”. Ciri utama dari sistem kapitalisme ini adalah tidak adanya perencanaan ekonomi sentral. Harga pasar yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang diproduksi, pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi yang bersaing. Semua ini adalah hasil dari kekuatan pasar. Dengan tidak adanya perencanaan terpusat mengandung arti adanya kekuasaan konsumen dalam memperoleh keuntungan. Kelemahan-kelemahan kapitalisme:

- a. Menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan social. Adam Smith berpendapat bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh individu pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial. Mengesampingkan

peran nilai moral sebagai alat filterisasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya.

- b. Memunculkan paham materialisme. Alasan utama mengapa kapitalisme gagal dalam mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang secara sosial diinginkan, ialah karena adanya konflik antara tujuan-tujuan masyarakat dan pandangan dunia dengan strategi kapitalisme. Tujuan-tujuannya memang humanitarian, didasarkan pada fondasi-fondasi moral, tetapi pandangan dunia dan strateginya adalah Darwinisme sosial. Klaim adanya keharmonisan antara kepentingan individu dan umum pada hakikatnya didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu mengenai kondisi-kondisi latar belakang yang salah dan tidak realistis, sehingga tidak pernah terbukti. Mengingat kondisi latar belakang ini tidak secara terang-terangan dituturkan dalam literatur ekonomi, maka secara normal tidak dapat dirasakan bagaimana ketiadaannya akan menyebabkan kegagalan dalam merealisasikan “efisiensi” dan “pemerataan” dalam alokasi sumber daya langka, yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan humanitarian masyarakat dan bukan terhadap Darwinisme sosial (Chapra, 2005: 47).

2. Sosialisme

Sebenarnya dapat kita lihat bahwa sistem sosialisme hanyalah sisi lain dari koin yang sama. Keduanya sama-sama

membawa masalah pada ekonomi dunia saat ini. Seperti sistem pasar, sistem sosialis juga gagal mencapai efisiensi dan keadilan. Tema utama sistem sosialis sebenarnya menurut Chapra adalah untuk menghilangkan bentuk-bentuk eksploitasi dan penyingkiran dalam sistem kapitalisme. Dengan demikian, diharapkan setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri.

Dalam sistem ini privat properti dan mekanisme pasar dihapus digantikan dengan kepemilikan negara untuk semua produksi dan perencanaan yang terpusat. Dalam ulasan tentang berbagai kesalahan asumsi pada sistem sosialis, Chapra menjelaskan bahwa sistem ini gagal menyediakan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki sebuah sistem.

- a. Untuk mekanisme filter yang menyaring semua klaim terhadap sumber daya agar terjadi keseimbangan dan ketepatan penggunaan sumber daya, justru sistem sosialis menunjukkan ketidakpercayaan secara penuh kepada kemampuan manusia mengelola kepemilikan pribadi.
- b. Untuk karakteristik sistem motivasi yang harus mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya, justru sistem sosialis tidak akan mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya. Ini disebabkan karena perencanaan yang

tersentralisasi, pelarangan hak milik pribadi, dan pengendalian penuh atas harga-harga oleh pemerintah.

3. Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan memperoleh momentum setelah depresi yang terjadi pada tahun 1930 di Amerika dan sebagai respon terhadap tantangan kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang terjadi karena depresi dan perang. Falsafah yang mendasarinya menunjukkan suatu gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwinisme sosial dari kapitalisme *laissez-faire* dan menuju kepada kepercayaan bahwa kesejahteraan individu merupakan sasaran yang teramat penting, yang realisasinya diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar. Falsafah ini berarti merupakan pengakuan formal-formal utama ekonomi bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhannya tidaklah berarti bukti kegagalan individu tersebut. Paham ini menuntut peran negara yang lebih aktif dalam bidang ekonomi dibandingkan peranannya dibawah paham kapitalisme *laissez-faire*.

Walaupun tujuan negara sejahtera berperikemanusiaan, namun ia tidak bisa membangun strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Problem ini muncul karena negara sejahtera menghadapi kekurangan sumber daya sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara lain. Apabila negara sejahtera meningkatkan pemanfaatannya atau sumber daya itu melalui

pelayanan kesejahteraan, ia harus menurunkan pemanfaatan lain ke atas sumber-sumber daya (Chapra, 1999: 57).

Ada tiga sasaran yang ingin diwujudkan oleh sistem Ekonomi Islam dalam pertumbuhan ekonomi Islam Umer Chapra, yaitu:

- a. Merealisasikan pertumbuhan ekonomi, ialah menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, seperti membuka koperasi simpan pinjam untuk masyarakat yang ingin membuka suatu usaha, meningkatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan sekaligus pengusaha yang bertugas mengombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa, meningkatkan sumber daya alam, dan lain-lain.
- b. Mewujudkan kesejahteraan manusia, untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut maka perlu suatu kewajiban kolektif (fardu kifayah) bagi masyarakat muslim untuk memberikan pembinaan latihan dan kesempatan kerja yang optimal. Lebih-lebih karena salah satu prinsip syariah mengajarkan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain.
- c. Mengurangi perbedaan pendapat dan pemerataan kekayaan, agar adanya sikap keadilan dari pemimpin, di mana bersikap adil dalam kepemimpinannya dimana suatu pemimpin itu tidak boleh memperkaya keluarga sendiri harus adil dalam masyarakat.

Dalam konsep ekonomi Islam menurut Umer Chapra, suatu negara harus memiliki landasan (prinsip-prinsip) ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan setidaknya-tidaknya terdiri atas empat komponen yakni: tauhid, adil, khilafah dan tazkiyah (Masyhuri, 2009: 25).

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut yang dapat diperoleh dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

Di setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor kekayaan alam. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi di percepat (Sukirno, 2007).

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari masa ke masa dapat menjadi pendorong maupun penghambat terhadap perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan mendorong jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah

produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan selalu bertambah tinggi. Maka dari itu menyebabkan produktifitas bertambah dan selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi tergantung kepada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Apabila di dalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun. Dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menimbulkan kemerosotan.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting dalam mempertinggi efesiensi pertumbuhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun, barang-barang modal sangat besar peranannya dalam kegiatan ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih

belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini (Sukirno, 2007).

2.4 Pengangguran

2.4.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2007: 50).

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Samuelson, 2004: 61).

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju dimana negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur (Nanga, 2005: 33).

Pengangguran dapat terjadi karena disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam

perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya ekonomi membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran.

Dalam ilmu kependudukan, orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja atau karena harus mengurus keluarga atau sekolah, itu tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan (Rahardja & Manurung, 2008).

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai struktur penduduk berdasarkan usia.



Gambar 2.1
Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Pada gambar 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk suatu dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja. Yang masuk kelompok bukan usia kerja (usia non-produktif) adalah anak-anak (0-14 tahun) dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia > 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia

kerja, yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk angkatan kerja (bukan angkatan kerja). Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan pekerjaan, mereka inilah yang disebut dengan penganggur.

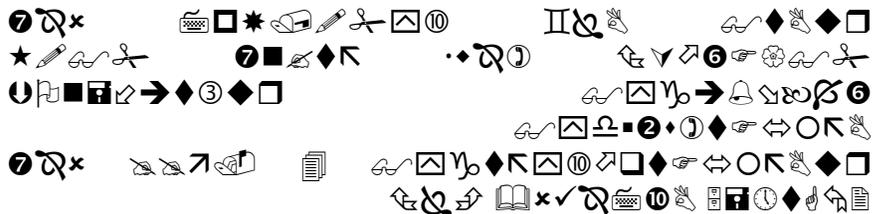
2.4.2 Pengangguran Dalam Perspektif Islam

Islam telah memperingatkan ummatnya agar tidak menganggur, hal ini terdapat dalam Q.S An-Naba ayat 11 yaitu:



“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”. (Q.S An-Naba [78]:11)

Kebanyakan faktor yang menjadikan individu memutuskan bekerja atau menganggur adalah upah atau gaji. Sedangkan dalam Islam, selain faktor materi ada pula nilai-nilai moral yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam mengambil keputusan. Upah atau gaji pasti dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya meskipun Allah telah menjamin memberikan rezeki kepada semua makhluk yang telah di ciptakan.



“Dan tidak ada satu hewan melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (lauhil mahfuzd)” (QS. Huud [11]: 6)

Walaupun dalam ayat tersebut Allah telah menjaminnya, tetapi hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang paling penting adalah usaha kita dalam mencari rezeki yang di janjikan oleh Allah, karena Allah telah membuat sistem yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang mendapat rezeki dan siapa yang berpangku tangan akan kehilangan rezeki.

Bermalas-malasan atau menganggur selain mendatangkan efek negatif bagi pelaku secara langsung, juga akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian. Karena pengangguran akan mengakibatkan ketidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat sebagian potensi faktor produksi yang tidak dimanfaatkan. Kelompok pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang produktif yang menjadikan angka ketergantungan meningkat yang akibatnya merosotnya pendapatan perkapita.

Qardhawi (2005: 47) menyatakan pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Pengangguran *jabariyah* (terpaksa)

Pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

Contohnya, ada seseorang yang ahli dalam bertani, tetapi dia tidak mempunyai alat untuk membajak ataupun sepetak lahan untuk dia garap.

b. Pengangguran *khiyariyah*

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya mampu untuk bekerja. Adapun pembagian kedua kelompok ini berkaitan erat dengan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran *jabariyah* perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran *khiyariyah* karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu

untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.

2.4.3 Jenis Pengangguran

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat macam di antaranya:

1. Pengangguran friksional atau transisi

Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.

2. Pengangguran Struktural

Jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan

terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan kerja. Salah satu faktor penyebab timbulnya pengangguran struktural adalah karena adanya kemajuan teknologi.

3. Pengangguran Alamiah

Tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh, atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan sama dengan tingkat inflasi aktual. Tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran dimana tekanan ke atas dan tekanan ke bawah terhadap inflasi harga dan upah berada dalam keseimbangan. Pada tingkat alamiah, inflasi adalah stabil, artinya tanpa kecenderungan untuk menampilkan percepatan ataupun penurunan inflasi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran alamiah juga sering didefinisikan sebagai tingkat pengangguran yang tidak memacu inflasi.

4. Pengangguran Siklis atau Konjungtural

Jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat di dalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat. Pengangguran jenis ini akan berkurang kalau tingkat kegiatan ekonomi meningkat (Nanga, 2005: 41).

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat adanya penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga

kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Dampak dari keadaan ini di dalam jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka (Sukirno, 2006).

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai (Sukirno, 2006).

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan mereka terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah panen. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

4. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi atau penghijrahan dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari (Sukirno, 2006).

Pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian dikarenakan oleh tiga hal antara lain :

- 1) Proses mencari kerja
- 2) Kekakuan upah
- 3) Efisiensi upah

2.4.4 Dampak dan Pengaruh Pengangguran

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat:

- a. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
 - 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya.
 - 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.

- 3) Pengangguran yang tinggi akan menghambat dalam arti tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat
- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
 - 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya keterampilan.
 - 3) Pengangguran dapat pula menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik (Nanga, 2005: 39).

Pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena hal tersebut menyia-nyiakan sumber daya yang berharga. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Jika pengangguran tinggi, keadaan ekonomi sulit meluap dan mempengaruhi emosi masyarakat dan kehidupan keluarga (Samuelson dkk, 2004).

2.5 Keterkaitan Variabel

2.5.1 Keterkaitan PAD dengan Tingkat Pengangguran

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah

sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Untuk mengoptimalkan dan mengelola PAD yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka diperlukan pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ ketimpangan regional.

Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri dan akan berpengaruh juga terhadap penurunan pengangguran di kota Banda Aceh.

2.5.2 Keterkaitan Belanja Sektor Keagamaan dengan Tingkat Pengangguran

Undang-undang desentralisasi yang direvisi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk memperluas basis pendapatannya, terutama dari pajak. UU No. 33/2004 memungkinkan pajak daerah, pungutan daerah, pendapatan dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang memenuhi ketentuan. Di Aceh, UU No. 18/2001 menambahkan satu komponen lagi yaitu zakat sebagai salah satu

sumber pendapatannya. Secara keseluruhan, pengaturan tentang pajak daerah didasarkan pada UU No. 34/2000 dan peraturan-peraturan pemerintah (PP 65/2001 dan 66/2001) tentang pajak dan pungutan daerah.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, salah satunya adalah hal belanja sektor keagamaan. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan yang ada di kota Banda Aceh. Dengan meningkatnya belanja keagamaan diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran di kota Banda Aceh.

2.5.3 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila

pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Apabila perekonomian meningkat maka daya serap angkatan kerja juga akan meningkat sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang dan kemungkinan besar dapat mengatasi permasalahan pengangguran di kota Banda Aceh.

2.6 Penelitian Terkait

Dari penelusuran referensi yang ada, tidak banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas persoalan “Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh” hal ini dapat dimaklumi karena sedikitnya yang melakukan kajian terhadap masalah tersebut, penulis mencoba melakukan kajian terhadap beberapa literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian yang dimaksud. Berikut adalah beberapa referensi yang penulis jadikan sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Putu Eka Suwandika, tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Swastika Enjang Prasasti, tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2007-2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana peimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY.

Meilita Lukitasari Anwar, tentang pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (kota Manado tahun 2001-2013). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Syukriy Abdullah, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, peraturan, sumber daya manusia, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh, sedangkan secara parsial juga berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pendidikan di provinsi Aceh.

Mujibur Rahman, tentang prosedur penyusunan anggaran belanja pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja disusun melalui beberapa proses yang tertuang dalam perencanaan tertulis dalam rencana kerja, rencana strategis, dan rencana pembangunan dengan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Perangkat Kota (RKPK). Secara umum klasifikasi anggaran belanja dibagi kedalam dua bentuk yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja tetap, belanja tupoksi, belanja inovasi dan belanja modal.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
1	Pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali tahun 2008-2012 (Putu Eka Suwandika)	Mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.
2	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah kabupaten/kota DIY tahun 2007-2013 (Swastika Enjang Prasasti)	Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY kemudian kinerja keuangan pemerintah tersebut.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana peimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY.
3	Pengaruh DAU, DAK dan PAD	Mengetahui pengaruh DAU,	Hasil analisis data menunjukkan bahwa

Tabel 2.1 - Lanjutan

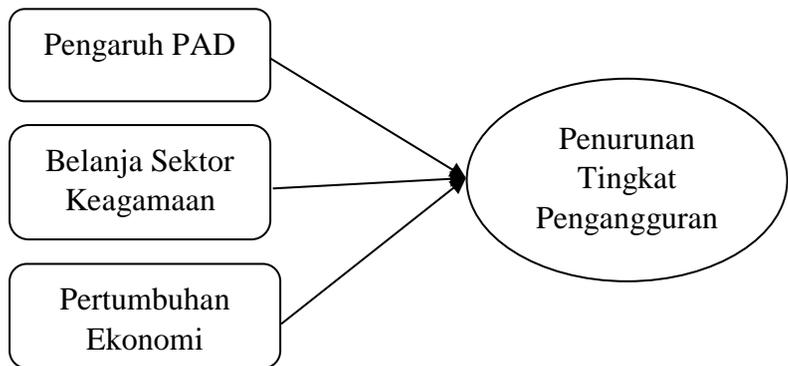
No	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
	terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Kota Manado tahun 2001-2013). (Meilita Lukitasari Anwar)	DAK, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara parsial dan simultan.	secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh (Syukriy Abdullah)	Mengetahui pengaruh faktor perencanaan, peraturan, SDM, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa terhadap realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh.	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, peraturan, sumber daya manusia, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh, sedangkan secara parsial juga berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pendidikan di provinsi Aceh.
5	Prosedur penyusunan anggaran belanja pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Banda Aceh	Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja disusun melalui beberapa proses yang tertuang dalam perencanaan tertulis dalam rencana kerja,

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan	Hasil
	(Mujibur Rahman)	Olahraga Kota Banda Aceh.	rencana strategis, dan rencana pembangunan dengan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Perangkat Kota (RKPK). Secara umum klasifikasi anggaran belanja dibagi kedalam dua bentuk yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja tetap, belanja tupoksi, belanja inovasi dan belanja modal.

2.7 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas di atas, maka dapat diuraikan kerangka berpikir mengenai “Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh”.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2006: 41).

Hipotesis 1

H_0 : Tidak ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

H₁: Ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

Hipotesis 2

H₀: Tidak ada pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

H₁: Ada pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

Hipotesis 3

H₀: Tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

H₁: Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

Hipotesis 4

H₀: Tidak ada pengaruh secara simultan antara pendapatan asli daerah, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

H₁ : Ada pengaruh secara simultan antara pendapatan asli daerah, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). Subana (2005: 25) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan ada pula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkam pemahaman atau mendiskusikan banyak hal.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2007).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam bentuk data time series selama periode 2007Q1 – 2017Q4. Data time series adalah data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari satu tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu/objek.

Data time series pada penelitian ini di ambil dari data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh dan Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh yaitu pendapatan asli daerah, belanja sektor keagamaan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran selama periode 2007 – 2017 (n=11). Kemudian data tersebut diolah menggunakan Eviews versi 10, di mana peneliti akan menjelaskan hasil dari olah data tersebut di bab 4.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Data tahunan Kota Banda Aceh berupa data pendapatan asli daerah, belanja sektor keagamaan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran selama periode 2007-2017.
2. Studi kepustakaan guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian, seperti dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan pembuatan skripsi.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas atau independen (Sugiono, 2007: 49). Variabel dependen (variabel tidak bebas) dalam penelitian ini

adalah tingkat pengangguran. Pengangguran yaitu tingkat pengangguran terbuka yang di ambil dari jumlah penduduk yang berada di usia kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan.

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Dalam penelitian ini, tingkat pengangguran diukur dalam satuan persen.

1.4.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan dengan notasi X. Adapun variabel independen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, PAD diukur dalam satuan jutaan rupiah.
2. Belanja sektor keagamaan, yaitu belanja daerah yang digunakan untuk mendukung sektor keagamaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil belanja sektor keagamaan dalam Dinas Syariat Islam saja dan belanja sektor keagamaan diukur dalam satuan jutaan rupiah.
3. Pertumbuhan ekonomi, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dalam

penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur dalam satuan persen.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Singkatan	Nama Variabel
1	Dependen	Y	Tingkat Pengangguran (%)
		X ₁	PAD (jutaan rupiah)
		X ₂	Belanja Sektor Kegamaan (jutaan rupiah)
2	Independen	X ₃	Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

3.5 Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam ketepatan pemilihan statistik alat uji. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan tahapan analisis sebagai berikut :

1. Melakukan uji lolos kendala linier atau yang sering disebut dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk melihat apakah model regresi berganda layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda, yang harus memenuhi kriteria yaitu uji F-test dan uji T-test

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa syarat sebelum melakukan regresi yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, multikolinearitas bebas dari gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji F dan uji t menjadi tidak valid. Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Kriteria penilaian uji ini adalah: jika signifikan hasil perhitungan data (Sig) >10%, maka data berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi hasil perhitungan data (Sig) < 10%, maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011: 31) menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan

nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- 1) Apabila *tolerance value* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independent pada model regresi.
- 2) Apabila *tolerance value* $< 0,1$ dan $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independent pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji heterokedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat menggunakan uji residual pada e-views versi 10 dengan

melihat *correlogram* dari *Q-stat* pada model. Jika terdapat p-value yang signifikan $< 0,1$ maka terdapat autokorelasi.

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus regresi berganda disesuaikan dengan jumlah variabelnya.

Dalam penelitian ini model analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (3.2)$$

di mana:

- Y : Tingkat Pengangguran
- α : *Intercept*
- X_1 : PAD
- X_2 : Pertumbuhan Ekonomi
- X_3 : Belanja Sektor Keagamaan
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- e : Besaran Nilai Residu

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu :

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t-test)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 90% dengan ketentuan sebagai berikut:

H_0 : apabila $p\text{-value} > 0,1$, maka H_0 diterima.

H_1 : apabila $p\text{-value} < 0,1$, maka H_1 diterima.

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila t hitung $>$ t tabel maka menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan yang digunakan 10%. Atau dengan melihat nilai dari signifikansi uji t masing-masing variabel, jika nilai signifikansi $<$ 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 dan menerima H_1 .

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-test)

Uji F dihitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen yaitu X_1 , X_2 dan X_3 secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F digunakan untuk menilai

kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Derajat keyakinan yang digunakan 10%. Jika nilai signifikansi $< 0,1$ maka variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Gujarati, 2006).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri atas persentase angka pengangguran, angka realisasi pendapatan asli daerah, jumlah belanja sektor keagamaan dan persentase angka pertumbuhan ekonomi selama periode 2007 – 2017.

4.1.1 Pengangguran

Definisi pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak berkerja tetapi sedang mencari perkerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat.

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001: 99).

Berikut tabel kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh tahun 2007-2017:

Tabel 4.1
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2017

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
2007	33,811	31,136	2,675
2008	105,820	93,730	12,090
2009	103,018	92,947	10,071
2010	90,840	80,335	10,505
2011	104,602	95,686	8,916
2012	97,973	90,944	7,029
2013	105,020	95,768	9,252
2014	112,067	100,592	11,475
2015	115,696	101,808	13,888
2016	117,567	105,996	11,571
2017	119,439	110,184	9,255

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2018)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa dari tahun 2007 hingga 2017 tingkat pengangguran di kota Banda Aceh mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Jumlah pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 13,888 jiwa dan jumlah paling rendah yaitu pada tahun 2007 yang mencapai 2,675 jiwa.

4.1.2 Pendapatan Asli Daerah

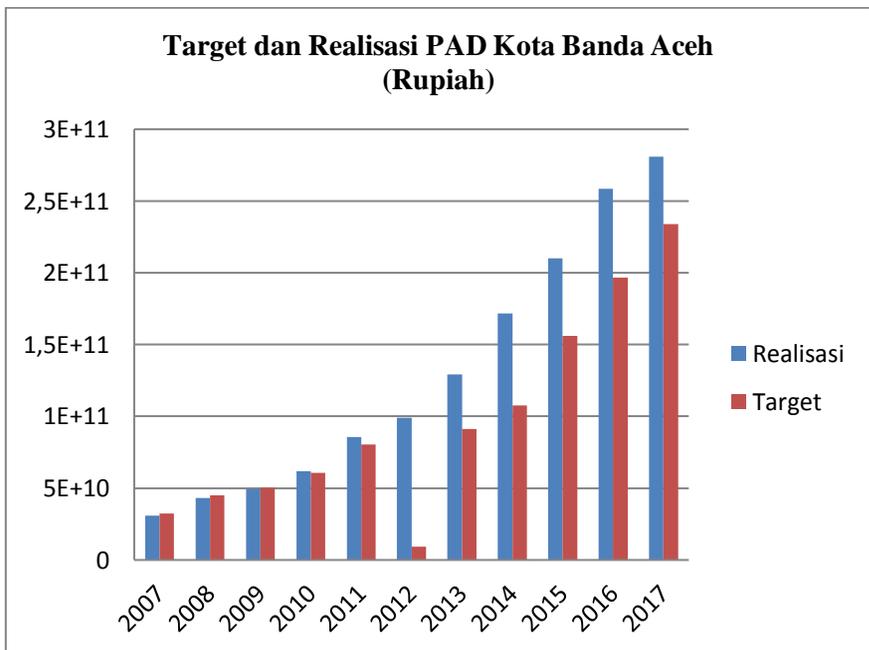
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Warsito (2001: 169) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Rahman (2005: 110) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan atau sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi

daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa, 1995: 73).

Berikut ini gambaran target dan realisasi PAD Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2017.



Sumber : BPS Aceh, data diolah penulis (2018)

Gambar 4.1
Target dan Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2017

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa target PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat rendah di bandingkan dari tahun 2007, namun hal ini tidak mempengaruhi tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 target PAD tetap mengalami peningkatan, begitu juga tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi PAD di kota Banda Aceh setiap tahunnyamengalami peningkatan. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 280.877.031.733 dan realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp 30.859.032.422.

4.1.3 Belanja Sektor Keagamaan

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan khususnya yang ada di Kota Banda Aceh yaitu, MPU, MAA, Baitulmall, Dinas Syariat Islam dan lain-lain.

Berikut ini gambaran belanja sektor keagamaan Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2017.



Sumber : BPKK, data diolah penulis (2018)

Gambar 4.2
Belanja Sektor Keagamaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2017

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa belanja sektor keagamaan dalam dinas syariat Islam dari setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2007 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan walaupun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan, namun penurunan yang di alami tidaklah terlalu signifikan sehingga tidak sangat mempengaruhi perubahan dalam belanja sektor keagamaan dalam sub sektor dinas syariat

Islam. Belanja keagamaan paling tinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 43.181.562.570 dan belanja keagamaan yang paling rendah yaitu tahun 2010 sebesar Rp 1.485.279.392.

4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2006) menyatakan bahwa kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perkeonomian dalam satu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah negara maju.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya itu merupakan faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang dan itu semua merupakan faktor non-ekonomi (Huda dkk, 2015: 82).

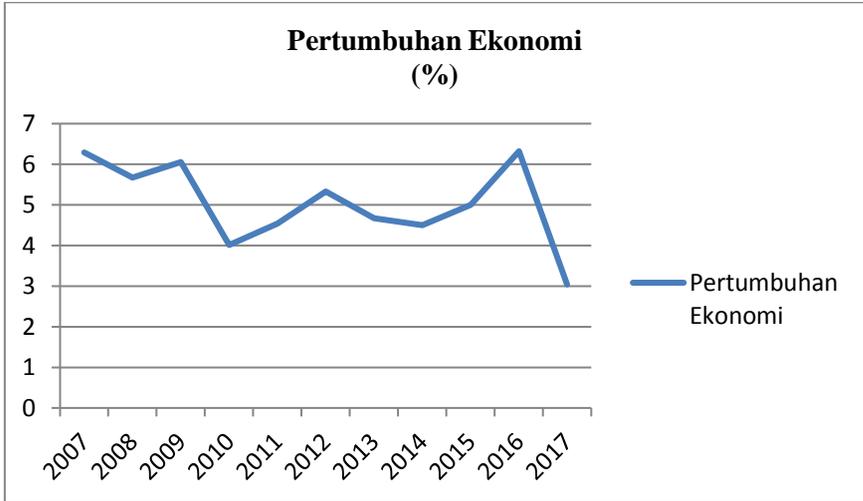
Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan saja persoalan ekonomi melainkan

aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual manusia (Tariqi, 2004).

Ada beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, di mana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan.

Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Islam juga mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan jumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya (Huda dkk, 2015: 125).

Berikut ini gambaran persentase pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2017.



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, data diolah penulis (2018)

Gambar 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2017

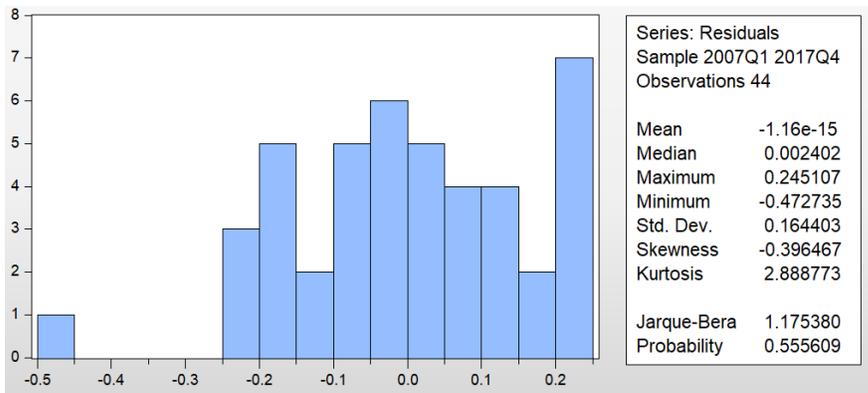
Dari gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4,01% namun pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi mulai tidak stabil kembali. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan kembali sebesar 3,04% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 3,04%.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.



Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

Gambar 4.4
Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui Pvalue ($0,555609 > \alpha (0,1)$) maka keputusan tidak dapat menolak H_0 sehingga kesimpulannya adalah data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel bebas.

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.167507	1768.015	NA
LPAD	0.005531	4809.774	4.417866
LBA	0.001388	993.2806	4.079101
LPE	0.007059	209.4352	1.180016

Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

Berdasarkan dari ketiga variabel di atas memiliki nilai $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.444952	Prob. F (3,40)	0.2441
Obs* R-squared	4.302114	Prob. Chi-Squared(3)	0.2306
Scaled explained SS	3.357735	Prob. Chi-Squared(3)	0.3397

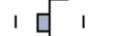
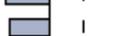
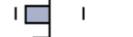
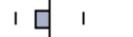
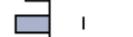
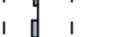
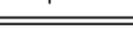
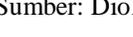
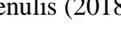
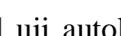
Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

Nilai p-value yang ditunjukkan dengan nilai Prob.chi square(3) pada Obs* R-Squared yaitu sebesar $(0,2306) > \alpha (0,1)$

maka keputusannya adalah terima H_0 sehingga kesimpulannya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.743	0.743	26.003	0.000
		2	0.450	-0.230	35.748	0.000
		3	0.159	-0.192	36.995	0.000
		4	-0.106	-0.188	37.559	0.000
		5	-0.293	-0.106	42.000	0.000
		6	-0.395	-0.089	50.304	0.000
		7	-0.359	0.079	57.346	0.000
		8	-0.220	0.096	60.062	0.000
		9	-0.150	-0.219	61.357	0.000
		10	-0.110	-0.129	62.083	0.000
		11	-0.122	-0.165	62.999	0.000
		12	-0.160	-0.115	64.625	0.000
		13	-0.208	-0.110	67.463	0.000
		14	-0.304	-0.257	73.691	0.000
		15	-0.276	0.029	79.022	0.000
		16	-0.163	-0.027	80.936	0.000
		17	-0.027	-0.057	80.991	0.000
		18	0.108	-0.086	81.892	0.000
		19	0.212	-0.069	85.532	0.000
		20	0.282	-0.069	92.221	0.000

Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

Gambar 4.5
Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui $p\text{-value} < \alpha$ (0,1) maka keputusannya adalah menolak H_0 sehingga

kesimpulannya terdapat masalah autokorelasi dan asumsi autokorelasi tidak terpenuhi.

4.2.2 Uji Kriteria Statistik

Uji kriteria Statistik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji t (uji parsial) dan uji F (uji signifikansi simultan). Berikut adalah tabel hasil dari regresi PAD, BA dan PE terhadap pengangguran:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.184730	1.080512	-5.723887	0.0000
LPAD	0.246935	0.074368	3.320445	0.0019
LBA	-0.128401	0.037255	-3.446580	0.0013
LPE	0.158057	0.084018	1.881238	0.0672
R-squared	0.257511	Mean dependent var	-3.753080	
Adjusted R-squared	0.201825	S.D. dependent var	0.190794	
S.E. of regression	0.170456	Akaike info criterion	-0.614167	
Sum squared resid	1.162214	Schwarz criterion	-0.451968	
Log likelihood	17.51168	Hannan-Quinn criter.	-0.554016	
F-statistic	4.624291	Durbin-Watson stat	0.315799	
Prob(F-statistic)	0.007202			

Sumber: Diolah oleh penulis (2018)

Gambar 4.6
Hasil Regresi Linear Berganda

Berdasarkan gambar 4.6 hasil pengolahan data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Parsial

- a. Variabel PAD memiliki probability kurang dari 10% yaitu sebesar 0,0019 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dengan penurunan tingkat pengangguran.
- b. Variabel belanja sektor keagamaan memiliki probability kurang dari 10% yaitu sebesar 0,0013 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja sektor keagamaan dengan penurunan tingkat pengangguran pada tingkat kepercayaan 90%.
- c. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki probability kurang dari 10% yaitu sebesar 0,0672 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran pada tingkat kepercayaan 90%.

2. Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.6 diperoleh nilai F Statistik sebesar 0,007202 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probability yang lebih kecil dari 10% sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran pada taraf kepercayaan 90%.

4.2.3 Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel *dependen* (kriterium), bila dua atau lebih variabel *independen* sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan penurunan tingkat pengangguran sebagai variabel dependen dan PAD, belanja sektor keagamaan dan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y_{it} = -6,18 + 0,24LPAD - 0,12LBA + 0,15LPE + \varepsilon \quad (4.1)$$

Persamaan regresi berganda 4.1 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta adalah sebesar -6,18 menunjukkan jika semua variabel independen yaitu PAD, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap maka nilai tingkat pengangguran yang di lambangkan dengan Y adalah sebesar 6,18 satu persen.
2. Nilai koefisien PAD sebesar 0,24 hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dan jika variabel lainnya diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 satuan PAD maka tingkat pengangguran ikut naik sebesar 0,24 satu persen.

3. Nilai koefisien belanja sektor keagamaan sebesar $-0,12$ hal ini menunjukkan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dan jika variabel independen lainnya diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 satuan belanja sektor keagamaan, tingkat pengangguran akan turun sebesar $0,12$ satu persen.
4. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar $0,15$ hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dan jika variabel independen lainnya diasumsikan bernilai tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran ikut naik sebesar $0,15$ satu persen.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh PAD Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh

Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-

undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

Hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa PAD memiliki nilai koefisien yang positif sehingga dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat pengangguran. Nilai probability PAD sebesar 0,0019 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti PAD berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran.

4.3.2 Belanja Sektor Keagamaan Terhadap Penurunan Pengangguran di Kota Banda Aceh

Belanja sektor keagamaan merupakan belanja daerah yang digunakan untuk mendukung sektor keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa belanja sektor keagamaan memiliki nilai koefisien yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif terhadap penurunan tingkat pengangguran. Nilai probability belanja sektor keagamaan sebesar 0,0013 sehingga H_0 di tolak dan H_1 diterima yang berarti belanja sektor keagamaan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik.

Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya.

4.3.3 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Pengangguran di Kota Banda Aceh

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan distribusi. Pertumbuhan bukan saja persoalan ekonomi melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien yang positif sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat pengangguran. Nilai probability belanja sektor keagamaan sebesar 0,0672 sehingga H_0 di tolak dan H_1 diterima yang berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,24 dan *p-value* sebesar 0,0019 hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan PAD akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,24 satu persen.
2. Belanja sektor keagamaan memiliki nilai koefisien sebesar -0,12 dan *p-value* sebesar 0,0013 hal ini menunjukkan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan belanja sektor keagamaan akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,12 satu persen.
3. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 0,15 dan *p-value* sebesar 0,06 hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,15 satu persen.
4. PAD memiliki pengaruh paling besar terhadap penurunan tingkat pengangguran diantara variabel lainnya yaitu sebesar 0,24 sedangkan variabel belanja sektor keagamaan memiliki

pengaruh paling kecil terhadap penurunan tingkat pengangguran yaitu sebesar -0,12.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Banda Aceh supaya dapat meningkatkan PAD yang ada di Kota Banda Aceh, sehingga untuk masa yang akan datang pemerintahan dapat membuka lebih banyak lagi lapangan kerja untuk masyarakat Kota Banda Aceh yang dananya bersumber dari PAD tersebut dan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran.
2. Untuk masyarakat umum, agar dapat membantu pemerintahan untuk menjalankan program-program yang mungkin kedepan di lakukan oleh pemerintahan untuk mendukung perubahan perekonomian dalam memakmurkan masyarakat dalam menekan angka pengangguran yang selama ini terjadi baik itu melalui partisipasi dari masyarakat tersebut maupun dari hal sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama.
- Abimanyu, A. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpah Tindih*. Yogyakarta: Bapekki Depkeu.
- Alamsyah, D. R. (2013). *Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aravik, H. (2017). *Ekonomi Islam, Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Malang: Gema Insani.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Kota Banda Aceh Dalam Angka 2017.
- Chapra, M. U. (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. U. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Green, dan Marshall, dkk. (2010). *Teori Ekonomi*. Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama.

- Gujarati, D.(2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2001). Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia) . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* .
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N, dkk. (2012). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N, dkk. (2015). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Kitab al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, N, dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Irawan, dan Suparmoko, M. (2002). *Ekonomika Pembangunan*. Ed 6. Jakarta: BPFE UGM
- Kaho. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kristiana, P. S. (2009). "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto" (Sebuah studi Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2011). *Jurnal Ekonomi dan PDRB* .

- Mamesa. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Mannan, A. (1997). *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama dalam Mimbar Hukum, No 33, Tahun VIII*. Jakarta: Al-Hikmah .
- Masyhuri. (2009). *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mawarni. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Di Aceh) . *Jurnal Akuntansi Volume 2, No. 2* , 80-90.
- Mudawal, dan Siregar. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fajar.
- Mudrajad, K. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nanga, M. (2001). *Mikro Ekonomi, Teori. Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Qardhawi, Y. (2005). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardja, P dan Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahman, H. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Rohani, A. (1997). *Media Intruksional Edukasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samuelson. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: Media Edukasi.
- Subana, S. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2007). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Tunggal, A. W. (2007). *Audit Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Yuwono, S. (2005). *Pengangguran Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Time Series

Kuartal	Pengangguran (%)	PAD (jiwa)	Belanja Keagamaan (jiwa)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007Q1	0,013659	6250000000	4570000000	0,016853
2007Q2	0,018276	7290000000	5880000000	0,015997
2007Q3	0,022086	8230000000	6870000000	0,015297
2007Q4	0,025089	9090000000	7570000000	0,014753
2008Q1	0,027285	9860000000	7960000000	0,014366
2008Q2	0,028675	10500000000	8050000000	0,014134
2008Q3	0,029257	11100000000	7840000000	0,014059
2008Q4	0,029033	11600000000	7320000000	0,014141
2009Q1	0,024641	11500000000	5350000000	0,015714
2009Q2	0,024147	12000000000	4680000000	0,015573
2009Q3	0,024191	12600000000	4170000000	0,015055
2009Q4	0,024771	13300000000	3820000000	0,014158
2010Q1	0,02912	13800000000	1080000000	0,010934
2010Q2	0,029483	14800000000	75930106	0,01006
2010Q3	0,029092	15900000000	4630000000	0,009588
2010Q4	0,027946	17200000000	1050000000	0,009518
2011Q1	0,023497	19600000000	2770000000	0,010752
2011Q2	0,021861	20900000000	3400000000	0,011123
2011Q3	0,020489	22100000000	3860000000	0,011536
2011Q4	0,019382	23100000000	4170000000	0,011989
2012Q1	0,018074	22800000000	3280000000	0,013151
2012Q2	0,017681	23900000000	3670000000	0,013418
2012Q3	0,017739	25300000000	4290000000	0,013459
2012Q4	0,018246	26900000000	5170000000	0,013273
2013Q1	0,020328	29000000000	7700000000	0,012102
2013Q2	0,021286	31100000000	8500000000	0,011766

Kuartal	Pengangguran (%)	PAD (jiwa)	Belanja Keagamaan (jiwa)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013Q3	0,022244	33300000000	8970000000	0,011507
2013Q4	0,023202	35800000000	9120000000	0,011324
2014Q1	0,02407	39100000000	7910000000	0,011148
2014Q2	0,025064	41700000000	7830000000	0,011146
2014Q3	0,026095	44200000000	7840000000	0,011249
2014Q4	0,027161	46700000000	7950000000	0,011457
2015Q1	0,029874	48500000000	8440000000	0,011711
2015Q2	0,030368	51000000000	8620000000	0,012152
2015Q3	0,030255	53800000000	8770000000	0,01272
2015Q4	0,029533	56600000000	8910000000	0,013417
2016Q1	0,026682	61100000000	8770000000	0,016359
2016Q2	0,025352	63700000000	8960000000	0,016466
2016Q3	0,024023	66000000000	9220000000	0,015853
2016Q4	0,022693	67800000000	9560000000	0,014522
2017Q1	0,021364	69200000000	9980000000	0,012472
2017Q2	0,020034	70100000000	10500000000	0,009703
2017Q3	0,018705	70700000000	11000000000	0,006216
2017Q4	0,017376	70900000000	11700000000	0,002009

Lampiran 2 Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LPENGANGGURAN

Method: Least Squares

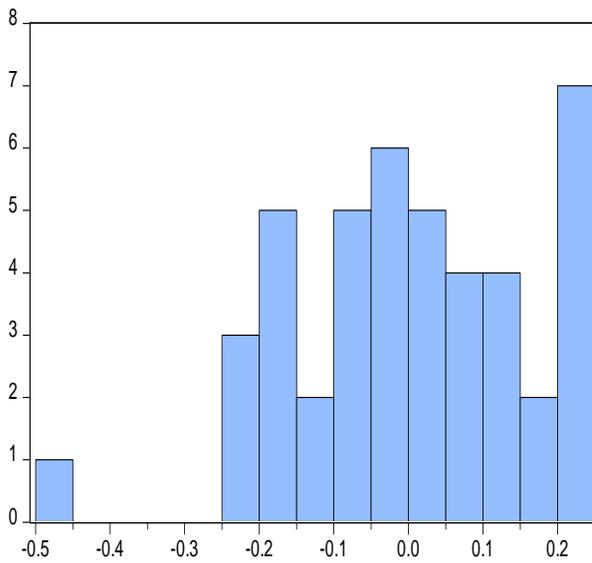
Date: 12/13/18 Time: 11:27

Sample: 2007Q1 2017Q4

Included observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.184730	1.080512	-5.723887	0.0000
LPAD	0.246935	0.074368	3.320445	0.0019
LBA	-0.128401	0.037255	-3.446580	0.0013
LPE	0.158057	0.084018	1.881238	0.0672
R-squared	0.257511	Mean dependent var		-3.753080
Adjusted R-squared	0.201825	S.D. dependent var		0.190794
S.E. of regression	0.170456	Akaike info criterion		-0.614167
Sum squared resid	1.162214	Schwarz criterion		-0.451968
Log likelihood	17.51168	Hannan-Quinn criter.		-0.554016
F-statistic	4.624291	Durbin-Watson stat		0.315799
Prob(F-statistic)	0.007202			

Lampiran 3 Uji Normalitas



Series: Residuals
Sample 2007Q1 2017Q4
Observations 44

Mean	-1.16e-15
Median	0.002402
Maximum	0.245107
Minimum	-0.472735
Std. Dev.	0.164403
Skewness	-0.396467
Kurtosis	2.888773

Jarque-Bera	1.175380
Probability	0.555609

Lampiran 4 Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 12/16/18 Time: 14:14

Sample: 2007Q1 2017Q4

Included observations: 44

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.167507	1768.015	NA
LPAD	0.005531	4809.774	4.417866
LBA	0.001388	993.2806	4.079101
LPE	0.007059	209.4352	1.180016

Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.444952	Prob. F(3,40)	0.2441
Obs*R-squared	4.302114	Prob. Chi-Square(3)	0.2306
Scaled explained SS	3.357735	Prob. Chi-Square(3)	0.3397

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/16/18 Time: 14:16

Sample: 2007Q1 2017Q4

Included observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.490426	0.229242	2.139338	0.0386
LPAD	-0.026884	0.015778	-1.703922	0.0962
LBA	0.009614	0.007904	1.216368	0.2310
LPE	0.006484	0.017825	0.363741	0.7180

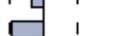
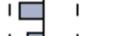
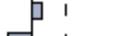
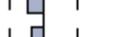
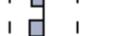
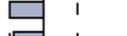
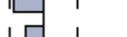
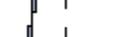
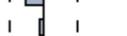
R-squared	0.097775	Mean dependent var	0.026414
Adjusted R-squared	0.030108	S.D. dependent var	0.036721
S.E. of regression	0.036164	Akaike info criterion	-3.714994
Sum squared resid	0.052314	Schwarz criterion	-3.552795
Log likelihood	85.72988	Hannan-Quinn criter.	-3.654843
F-statistic	1.444952	Durbin-Watson stat	0.933978
Prob(F-statistic)	0.244073		

Lampiran 6 Uji Autokorelasi

Date: 12/16/18 Time: 14:19

Sample: 2007Q1 2017Q4

Included observations: 44

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.743	0.743	26.003	0.000
		2	0.450	-0.230	35.748	0.000
		3	0.159	-0.192	36.995	0.000
		4	-0.106	-0.188	37.559	0.000
		5	-0.293	-0.106	42.000	0.000
		6	-0.395	-0.089	50.304	0.000
		7	-0.359	0.079	57.346	0.000
		8	-0.220	0.096	60.062	0.000
		9	-0.150	-0.219	61.357	0.000
		10	-0.110	-0.129	62.083	0.000
		11	-0.122	-0.165	62.999	0.000
		12	-0.160	-0.115	64.625	0.000
		13	-0.208	-0.110	67.463	0.000
		14	-0.304	-0.257	73.691	0.000
		15	-0.276	0.029	79.022	0.000
		16	-0.163	-0.027	80.936	0.000
		17	-0.027	-0.057	80.991	0.000
		18	0.108	-0.086	81.892	0.000
		19	0.212	-0.069	85.532	0.000
		20	0.282	-0.069	92.221	0.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Redhayatul Syaffitri
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 25 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Alamat : Jl. Kebon Raja, Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp/HP : 082365522080
Email : redhayatul.s@gmail.com
Warga Negara : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

2001 – 2002 : TK Pembina Tapaktuan
2002 – 2008 : SDN 2 Tapaktuan
2008 – 2011 : MTsN Tapaktuan
2011 – 2014 : MAN Unggul Tapaktuan
2014 – 2018 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

C. Orang Tua

Nama ayah : Ir. Syafruddin
Pekerjaan ayah : PNS
Nama Ibu : Hayatul Wardani, SP
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat orang tua : Tapaktuan

D. Pengalaman Organisasi

2009 – 2010 : Bendahara OSIM MTsN Tapaktuan
2012 – 2013 : Anggota OSIM MAN Unggul Tapaktuan
2012 – 2013 : Ketua Palang Merah Remaja (PMR) MAN
Unggul Tapaktuan
2015 – 2016 : Anggota Divisi Jurnalistik HMP Ekonomi
Syariah